



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2011 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategy (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra SKPD dan Renja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program / kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Harapan kami semoga LAKIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2012

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. MS. HERUWIDI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690219 198809 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan melaporkan Capaian Kinerja selama Tahun 2011 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011 yang terimplementasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2011. Sesuai dengan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2011.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2011 dijelaskan bahwa “ Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2011 “ dengan tetap merujuk pada Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015.

1. Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan 6 (enam) Tujuan, 15 (lima belas) Sasaran 8 (delapan) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan sumber anggaran pendapatan dalam APBD Tahun 2011 (Anggaran Perubahan) sebesar Rp. 1.640.268.000,- secara umum masing-masing program dan kegiatan telah tercapai dengan baik dan sesuai target, namun demikian masih terdapat capaian kinerja yang belum sepenuhnya berhasil memenuhi target kinerja RPJMD 2010-2015.

Sebagai perwujudan pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2011, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya manusia
2. Pembinaan dan Bantuan Sarana dan prasarana seperti pembangunan jembatan dan jalan poros desa.
3. Penanganan dan Bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya terhadap hasil pencapaian akuntabilitas kinerja beberapa sector tersebut tentunya Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus berupaya untuk mempertahankan dan memantapkan terhadap program-program yang telah tercapai sesuai bahkan melebihi target serta melakukan inovasi pengembangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Sedangkan terhadap program-program yang belum optimal, diupayakan peningkatannya pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG	1
B TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
C ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A RENCANA STRATEJIK	9
1. Visi	9
2. Misi	
3. Tujuan	
4. Sasaran	
B RENCANA KINERJA	14
1. Sasaran dan Indikator Sasaran	
2. Program	
3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan	
C PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A PENGUKURAN KINERJA	19
B EVALUASI KINERJA	25
C ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	27
D AKUNTABILITAS KEUANGAN	28
BAB V PENUTUP	31
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
➤ Rencana Strategik (RS)	
➤ Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
➤ Penetapan Kinerja (PK)	
➤ Pengukuran Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 tanggal 18 Desember 2000 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

Sehubungan dengan keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, maka tiap akhir tahun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasar pada :

- TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP.
- Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja.
- Perda Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 -2015.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai :

1. Unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2. Mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

- i. Perumusan kebijakan teknis pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat di daerah.
 - ii. Pelayanan penunjang bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat di Daerah.
 - iii. Penyiapan bahan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
 - iv. Penyiapan bahan penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat.
 - v. Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat.
 - vi. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

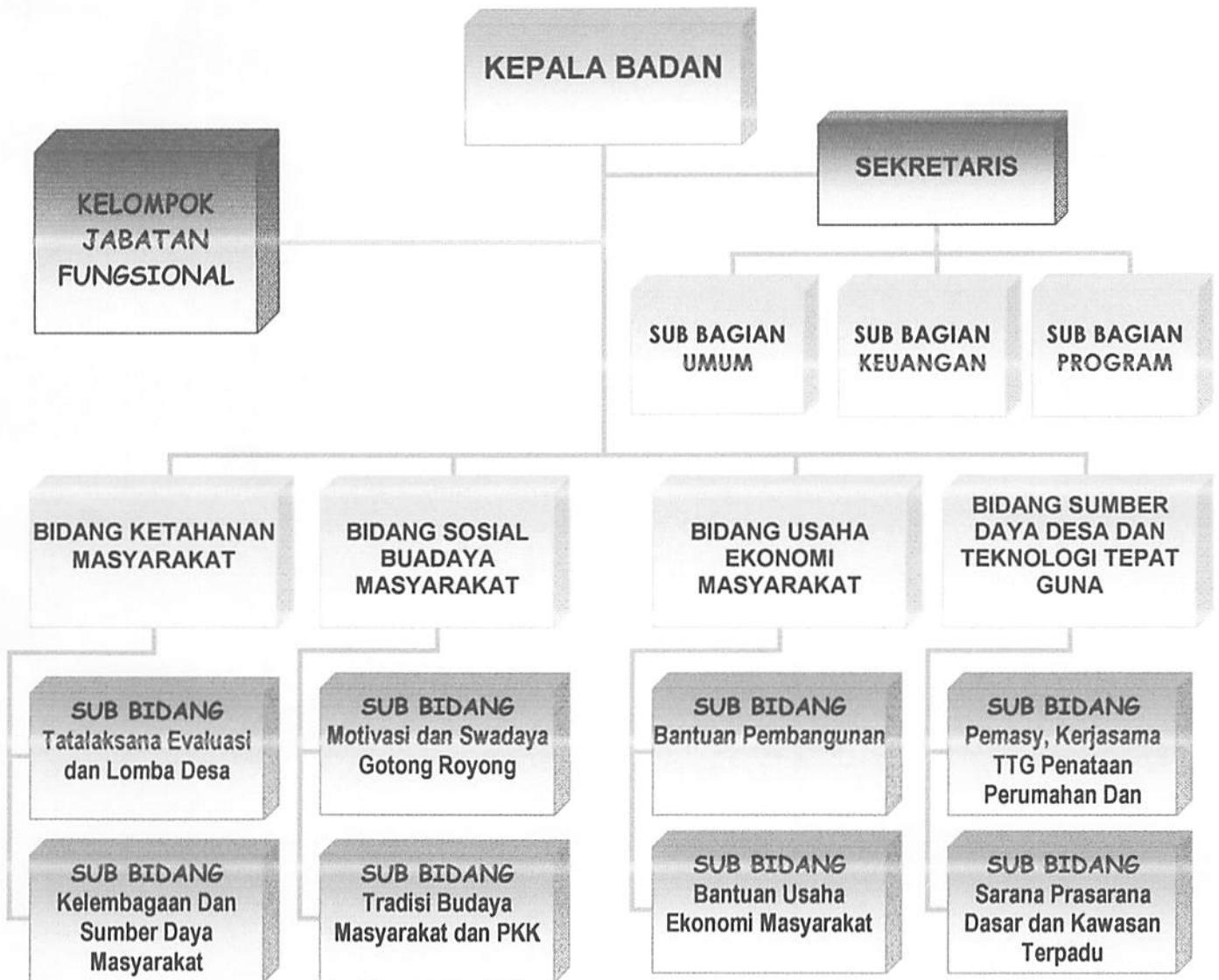
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur organisasi terdiri atas :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat.
 - 2.1. Sub Bagian Umum.
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan.
 - 2.3. Sub Bagian Program.
3. Bidang Ketahanan Masyarakat.
 - 3.1. Sub Bidang Tatalaksana Evaluasi dan Lomba Desa.
 - 3.2. Sub Bidang Kelembagaan Dan Sumber Daya Masyarakat.
4. Bidang Sosial Budaya Masyarakat.
 - 4.1. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong.
 - 4.2. Sub Bidang Tradisi Budaya Masyarakat dan PKK.
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - 5.1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan.
 - 5.2. Sub Bidang Bantuan Usaha Ekonomi Masyarakat.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 6. Bidang Sumber Daya Desa dan Teknologi Tepat Guna.**
 - 6.1. Sub Bidang Pemas, Kerjasama TTG Penataan Perumahan Dan Pemukiman.**
 - 6.2. Sub Bidang Sarana Prasarana Dasar dan Kawasan Terpadu.**
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN**



1. Personil

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan didukung oleh 52 orang, yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SLTP sampai dengan Magister (S2).

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET
1	Kepala Badan	1	Pembina Tingkat I IV.b	1	S.3	1	
2	Sekretaris	1	Pembina I IV.a	1	S.2	1	
3	Kepala Bidang	4	Pembina Tk. I IV.b	1	S.2	1	
			Pembina IV.a	3	S.2	3	
4	Kepala Subbidang/ subbag	12	Penata Tk. I III.d	7	S.1	7	
			Penata III.c	2	S.1	2	
			Penata Muda Tk. I III.b	1	S.2	1	
5	Staf	36	Penata Tk. I III.d	2	S.1	2	
			Penata Muda Tk. I III.b	10	S.1	4	
					SLTA	6	
			Penata Muda III.a	7	S.1		
					SLTA	1	
			Pengatur II.c	2	SLTP	2	
			Pengatur Muda TK. I II.b	2	SLTA	1	
					SLTP	1	
			Pengatur Muda II.a	1	SLTA	1	
Juru Tingkat I I.d	1	SLTP	1				
Tenaga Kontrak	11	S.1	5				
		SLTA	5				
		SLTP	1				
JUMLAH		52		52		52	

Tabel I : Data Kepegawaian Tahun 2011

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel II.

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mobil Roda 4	5	
2	Motor Roda 2	13	
3	Tustel	4	
4	Mesin Ketik	5	
5	Calulator	11	
6	Mesin Stensil	1	
7	Feling Kabinet	10	
8	Rak Besi	1	
9	Rak Kayu	1	
10	Almari Besi	1	
11	Brankas	3	
12	Whiteboard	2	
13	Almari Kayu	9	
14	Kursi Kerja	92	
15	Meja Kerja	54	
16	Meja Kursi Tamu	1	
17	Kipas angin	5	
18	Kamera	1	
19	Meja Rapat	10	
20	Telepon	2	
21	Computer	17	
22	Tabung Pemadam Kebakaran	1	
23	Intercom	2	
24	Printer	9	
25	Pompa air	1	
26	Tempat sampah besar	1	
27	Overhead	1	
28	AC	2	
29	Soundsystem	1	
30	Handycam	1	
31	Dispenser	2	
32	LCD	2	
33	Laptop	4	
34	Kamera Digital	3	
35	UPS	1	

Tabel II : Data Sarana dan Prasarana Tahun 2011

3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
I.	Belanja Daerah	Rp. 3.778.211.000,-	
1.	<u>Belanja Tidak Langsung</u> Belanja Pegawai	Rp. 2.137.943.000,- Rp. 2.137.943.000,-	
2.	<u>Belanja Langsung</u> a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	<u>Rp. 1.640.268.000,-</u> Rp. 330.553.000,- Rp. 1.270.715.000,- Rp. 39.000.000,-	

Tabel III : Data Keuangan Sumber Dana dari APBD Tahun 2011.

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat di daerah.
2. Pelayanan bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat di daerah.
3. Penyiapan bahan penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat.

4. **Penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna.**
5. **Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat**
6. **Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Pemberdayaan Masyarakat.**
7. **Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.**

Keunggulan ini dapat diwujudkan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan kompleks. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya "Sense of responsibility and professionally" dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. Sense of responsibility, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara professionally lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

2. Misi :

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila Instansi Pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi masalah dan kendala yang dihadapi.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan mempunyai Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa / kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sarana yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja.
- 2) Mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan di sektor informal dengan mendayagunakan potensi ekonomi, lembaga ekonomi dan stimulan dana pembangunan (sarana dan prasarana) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
- 3) Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Desa melalui kerjasama teknologi yang ramah lingkungan.
- 4) Melestarikan sosial budaya masyarakat, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam proses pembangunan berdasarkan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat serta kebersamaan.
- 5) Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dan masyarakat melalui manajemen perencanaan partisipatif sebagai alat ukur / evaluasi hasil pembangunan desa.
- 6) Meningkatkan peranan perempuan utamanya di perdesaan melalui pengembangan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan.

3. Tujuan :

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang diserahkan kepada SKPD. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Terwujudnya produktivitas ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya produktifitas berusaha dalam upaya peningkatan kualitas hidup melalui pemanfaatan teknologi terapan melalui pengenalan dan pemasyarakatan TTG serta pemanfaatan sumber daya desa.
4. Terwujudnya hasil-hasil pembangunan desa melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan serta kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan kader-kader pembangunan dalam mengelola pembangunan desa; dengan meningkatkan keswadayaan dan kegotong-royongan serta melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat.
5. Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Desa, kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan melalui manajemen perencanaan partisipatif serta pelayanan kepada masyarakat.
6. Terwujudnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

2. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan Tupoksinya.
2. Meningkatnya jumlah kelompok ekonomi informal di pedesaan/ kelurahan yang dapat mengarah pada berkembangnya sektor usaha sehingga akan menambah dan membuka lapangan pekerjaan, yang diikuti dengan tersedianya modal dan stimulan secara mudah dan cepat.
3. Meningkatnya pendapatan Pokmas.
4. Meningkatnya kelompok masyarakat pengelola industri kecil dan rumah tangga dalam memproduksi secara kuantitatif dan kualitatif dengan pemanfaatan TTG.
5. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perdesaan/ kelurahan dan menurunnya RTM serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin.
6. Terwujudnya perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.
7. Terwujudnya desa berprestasi tingkat kabupaten, yang diikuti dengan pendataan profil desa/kelurahan serta meningkatnya swadaya masyarakat disemua desa/kelurahan dalam pembangunan yang digalang oleh kelompok masyarakat potensial, kader dan tenaga terampil.
8. Terwujudnya penanganan pembangunan kawasan terpencil dan desa-desa tertinggal dan terdatanya semua proyek masuk desa/kecamatan.
9. Terwujudnya peningkatan nilai gotong royong atas dasar tradisi dan adat istiadat yang berlaku disemua desa dan kalangan masyarakat.

10. Meningkatnya tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang semakin tertib dan terlaksananya sistem mekanisme pembangunan Desa/Kelurahan.
11. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam memberdayakan masyarakat.
12. Meningkatnya tertib administrasi.
13. Meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
14. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
15. Meningkatnya peranan perempuan perdesaan di seluruh Kabupaten Lamongan dengan mengikut sertakan dalam proses pembangunan, sehingga akan terwujud kesejahteraan keluarga.

B. RENCANA KINERJA

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

- 1) **Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, dengan indikator :**
 - Tersedianya dokumen profil desa dan data dasar keluarga
 - 2) **Terselenggaranya program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator :**
 - Peningkatan SDM pelayanan dan pendamping PPT.
 - Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan.
 - 3) **Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial, dengan indikator :**
 - Penurunan angka pengangguran.
 - Penurunan angka penduduk miskin.
 - 4) **Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan indikator :**
 - Peningkatan kinerja lembaga desa dan memantapkan kelembagaan desa.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
 - 5) **Meningkatnya Industri, dengan indikator :**
 - Peningkatan mutu produk.
-

2. Program

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi.
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 4) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- 5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- 6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
- 7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

- 1) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah (Pendataan Profil Desa/Kelurahan Dalam Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan), dengan indikator :
Tersedianya dokumen profil Desa/Kelurahan yang akurat sebagai dan sebagai bahan acuan program pembangunan desa / kelurahan.
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (Pelatihan Konseling Pendamping PPT) , dengan indikator :
Peningkatan SDM Pelayan dan Pendamping PPT.
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah (Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)), dengan indikator :
Terfasilitasnya pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).
- 4) Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif (Pendamping Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)), dengan indikator :
Terlaksananya aktifitas administrasi dan realisasi kegiatan sesuai dengan tahapan dan tepat waktu dalam pelaksanaannya.

- 5) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan), dengan indikator :
Menurunnya angka pengangguran di masyarakat.
- 6) Kegiatan Program peningkatan keberdayaan masyarakat, dengan indikator :
Penurunan Jumlah penduduk miskin.
- 7) Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM dan KPMD)), dengan indikator :
Meningkatnya kinerja lembaga Desa dan memenatkan kelembagaan desa (LPM dan KPMD).
- 8) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat (Sistem informasi pendayagunaan profil desa dan kelurahan), dengan indikator :
Meningkatnya lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan yang aktif.
- 9) Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat), dengan indikator :
Meningkatnya Desa/Kelurahan yang memenuhi standart kelurahan sehat.
- 10) Kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa), dengan indikator :
Meningkatnya sistem perencanaan program dan kegiatan di Desa/Kelurahan.
- 11) Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa (pendamping pembangunan sarana dan prasarana pedesaan), dengan indikator :
Terlaksananya penata usahaan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan.
- 12) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (pelaksanaan evaluasi pembangunan desa/kelurahan), dengan indikator :
Tersedianya data untuk perencanaan dan pembangunan.
- 13) Kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Desa (pendamping alokasi dana desa), dengan indikator :

- # Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
- 14) Kegiatan Pengembangan sistem inovasi teknologi industri (Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional), dengan indikator :
 - # Tersosialisasinya teknologi tepat guna berstandar.
- 15) Kegiatan penyusunan data dasar keluarga di pedesaan/kelurahan, dengan indikator :
 - # Tersedianya data dasar keluarga.
- 16) Kegiatan fasilitasi paska program peningkatan keberdayaan masyarakat, dengan indikator :
 - # Terwujudnya pemberdayaan masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan.
- 17) Kegiatan Pengembangan ekonomi kawasan dan pasar desa, dengan indikator :
 - # Terlaksanya pengembangan ekonomi kawasan dan pasar desa.
- 18) Kegiatan Program pemberdayaan potensi desa/kelurahan (P3DK), dengan indikator :
 - # Terlaksananya pengembangan dan pembangunan potensi desa.
- 19) Kegiatan fasilitasi program penguatan desa mandiri, dengan indikator :
 - # Terwujudnya desa mandiri berbasis kawasan perdesaan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja / Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2011 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan dalam tahun 2011 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2011 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2010 – 2015.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Strategik (RENSTRA – Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015) yang telah dicantumkan indikator sasaran dan kinerjanya.

Indikator tersebut adalah merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), dengan **Skala Pengukuran Ordinal**, sebagai berikut :

85 – 100	= Sangat Baik / Sangat Berhasil.
70 – 85	= Baik / Berhasil.
55 - < 70	= Kurang Baik / Kurang Berhasil.
< 55	= Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil

- 1) Evaluasi hasil-hasil dan kinerja inputs, outputs dan outcomes.
 - a) Program Pengembangan Data/Informasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 88.000.000,- untuk Penyusunan Profil Daerah dan Penyusunan Data Dasar Keluarga di Pedesaan/Kelurahan, jumlah dokumen profil desa/kelurahan sebanyak 474 buku, jumlah desa yang menerima bantuan yaitu 14 Desa di 4 Kecamatan, dan terealisasi keuangan sebesar Rp 87.825.000,- atau 99,71 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai tersedianya dokumen profil desa dan dokumen data dasar keluarga.
 - b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak (Pelatihan Konseling Pendamping PPT) dengan mengadakan pelatihan SDM yang diikuti oleh 50 orang peserta, dan terealisasi keuangan sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai peningkatan SDM pelayanan dan pendamping PPT.

- c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000,- untuk Kegiatan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah (Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)) dan Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif (Pendamping Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)), dan terealisasi keuangan sebesar Rp 35.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai jumlah Desa/Kelurahan dan orang yang mendapatkan bantuan.
- d) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 255.250.000,- untuk Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan), Program peningkatan keberdayaan masyarakat (PPKM), dan fasilitasi paska program peningkatan keberdayaan masyarakat (PPKM) dan terealisasi keuangan sebesar Rp 29.700.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai yaitu menurunnya angka pengangguran di masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan.
- e) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,- untuk Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat dan terealisasi keuangan sebesar Rp 80.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai meningkatnya jumlah lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan yang aktif.

- f) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- untuk Kegiatan Pengembangan ekonomi kawasan dan pasar desa dengan membangun 2 pasar desa di 2 kecamatan dan terealisasi keuangan sebesar Rp 75.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai jumlah pengembangan ekonomi kawasan dan pasar desa.
 - g) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 638.500.000,- untuk Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Musyawarah pembangunan desa, Pemberian Stimulan pembangunan Desa, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi ADD, Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan dan fasilitasi program penguatan desa mandiri dan terealisasi keuangan sebesar Rp 638.500.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai jumlah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun kawasan desa.
 - h) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- untuk Kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri dan terealisasi keuangan sebesar Rp 75.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %, dengan indikator kinerja yang dicapai Persentase peningkatan mutu produk.
- 2) Hambatan yang dihadapi beserta langkah-langkah yang telah diambil mengatasi hambatan.
- a) Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya dan manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.
 - b) Penerapan prinsip nilai (tranparansi, keterbukaan dan akuntabilitas) tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat.

- d) Identifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat.
 - e) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam melaksanakan kebijakan, program kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - f) Pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan usaha di bidang pemberdayaan masyarakat.
- 3) Analisis kegiatan dalam pencapaian sasaran.

Adapun Analisa Capaian Kinerja setiap pelaksanaan kegiatan Tahun 2011 antara lain :

- a) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah (Pendataan Profil Desa/Kelurahan Dalam Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan), jumlah dokumen profil desa sebanyak 474 buah dengan jumlah anggaran Rp 60.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 59.825.000,- atau 99,71 % dan fisik sebesar 100 %.
- b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan sebanyak 50 orang dengan jumlah anggaran Rp 20.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- c) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah dengan tercapainya pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan sebanyak 1 lembaga, jumlah anggaran Rp 25.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 25.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- d) Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif, dengan jumlah anggaran Rp 10.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 10.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- e) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, jumlah kelompok sasaran terdapat di 25 kecamatan dengan menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek yang diikuti oleh 150 pokmas, jumlah anggaran Rp 200.000.000,- dan terealisasi

keuangan sebesar Rp 200.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.

- f) Kegiatan Program peningkatan keberdayaan masyarakat, dengan kelompok sasaran 3 desa di 3 kecamatan dengan jumlah anggaran Rp 40.250.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 40.250.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- g) Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, jumlah LPM / KPMD yang mengikuti pelatihan sebanyak 160 orang dengan jumlah anggaran Rp 40.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 40.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- h) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat, jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 501 orang dengan jumlah anggaran Rp 40.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 40.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- i) Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) guna meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dengan jumlah anggaran Rp 50.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 50.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- j) Kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di 474 Desa/Kelurahan dengan jumlah anggaran Rp 185.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 185.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- k) Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa, jumlah lokasi jalan poros dan jembatan yang dibangun sebanyak 213 lokasi di 27 desa pada 27 Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp 200.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 200.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- l) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, jumlah desa yang dievaluasi 27 Desa di 27 Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp

90.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 90.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.

- m) Kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Desa, jumlah yang mengikuti sosialisasi 462 orang dengan jumlah anggaran Rp 90.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 90.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- n) Kegiatan Pengembangan sistem inovasi teknologi industri, jumlah pelaksanaan kegiatan 1 dengan jumlah anggaran Rp 25.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 25.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- o) Kegiatan penyusunan data dasar keluarga di pedesaan/kelurahan, jumlah kelompok sasaran 14 Desa/Kelurahan di 4 Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp 28.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 28.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- p) Kegiatan fasilitasi paska program peningkatan keberdayaan masyarakat, jumlah kelompok sasaran di 2 Desa dengan jumlah anggaran Rp 15.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 15.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- q) Kegiatan Pengembangan ekonomi kawasan dan pasar desa, kelompok sasaran Pasar Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo dan Pasar Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup dengan jumlah anggaran Rp 75.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 75.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- r) Kegiatan Program pemberdayaan potensi desa/kelurahan (P3DK), kelompok sasaran 1 Desa dalam 1 Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp 13.500.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 13.500.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.
- s) Kegiatan fasilitasi program penguatan desa mandiri, kelompok sasaran 1 Desa dalam 1 Kecamatan dengan jumlah anggaran Rp 10.000.000,- dan terealisasi keuangan sebesar Rp 10.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.

B. EVALUASI KINERJA

- 1) Evaluasi pencapaian sasaran.
 - a) Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja :
 - Tersedianya dokumen profil desa, dimana jumlah dokumen profil Desa/Kelurahan sebanyak 474, sedangkan jumlah Desa/ Kelurahan sebanyak 474 atau 100 %. Target yang diharapkan 100 % maka tingkat capaiannya 100 %.
 - Tersedianya data dasar keluarga, dimana jumlah data dasar keluarga pada tahun 2011 sebanyak 14 desa/ Kelurahan di 4 Kecamatan, sedangkan jumlah Desa/ Kelurahan sebanyak 474 atau 2,95 %. Target yang diharapkan 100 % maka tingkat capaiannya 100 %
 - b) Sasaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator kinerja :
 - Peningkatan SDM pelayanan dan pendamping PPT, dimana jumlah yang mengikuti pelatihan SDM 50 orang. Target yang diharapkan 50 orang maka tingkat capaiannya 100 %.
 - Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan, dimana jumlah lembaga yang terfasilitasi sebanyak 1 lembaga. Target yang diharapkan 1 lembaga maka tingkat capaiannya 100 %
 - c) Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial dengan indikator kinerja :
 - Penurunan angka pengangguran di masyarakat, dimana jumlah pengangguran di targetkan turun 8,56%. Target yang diharapkan 8,56 % maka tingkat capaiannya 100 %
 - Penurunan angka penduduk miskin, dimana kelompok sasaran kegiatan ditargetkan 3 desa di 3 kecamatan. Target yang diharapkan 3 desa di 3 kecamatan maka tingkat capaiannya 100 %.
 - d) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan indikator kinerja :

- Peningkatan kinerja lembaga desa dan memantapkan kelembagaan desa, dimana menyelenggarakan pelatihan kepada 160 pengurus LPM dan KPMD di Kabupaten Lamongan. Target yang diharapkan 160 pengurus maka tingkat capaiannya 100 %.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan menyelenggarakan Bulan Bhakti Gotong Royong, Musrenbang Desa di 474 desa/kelurahan, pembangunan jembatan dan jalan poros desa serta dengan melakukan evaluasi dan monitoring kepada 27 kecamatan. Target yang diharapkan 100 % maka tingkat capaiannya 100 %.
 - e) Sasaran meningkatnya Industri dengan indikator kinerja :
 - Peningkatan mutu produk, dimana kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 1 kegiatan. Target yang diharapkan 100 % maka tingkat capaiannya 100 %.
- 2) Hambatan yang dihadapi beserta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan.
- a) Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
 - b) Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek dalam lintas bidang dan organisasi.
 - c) Bekerja secara proaktif didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
 - d) Mencermati berbagai peristiwa aktual kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan.
- 3) Analisis sasaran dalam kaitannya untuk mencapai tujuan.
- a) Sebagaimana capaian kinerja yang diuraikan diatas diharapkan bisa meningkatkan kemampuan ekonomi dan produktifitas andalan daerah.

- b) Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

INDIKATOR	TARGET	REALISASI S/D TAHUN INI	TAHUN BERJALAN		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tersedianya dokumen profil desa dan data dasar keluarga	100 %	$\frac{474}{474}$	100 %	$\frac{474}{474}$	
Peningkatan SDM pelayanan dan pendamping PPT	100 %	$\frac{50}{50}$	100 %	$\frac{50}{50}$	
Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	100 %	$\frac{1 \text{ lembaga}}{1 \text{ lembaga}}$	100 %	$\frac{1 \text{ lembaga}}{1 \text{ lembaga}}$	
Penurunan angka pengangguran	8,56 %		8,56 %		
Penurunan angka penduduk miskin	8,56 %		8,56 %		
Peningkatan kinerja lembaga desa dan memantapkan kelembagaan desa	100 %	$\frac{160}{160}$	100 %	$\frac{160}{160}$	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	10,96 %		10,96 %		
Peningkatan mutu produk	14 %		14 %		

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang digunakan untuk mendukung dan mewujudkan pencapaian sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2011, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH DANA RP	REALISASI RP	SIASA RP	%
1	2	3			4
	BELANJA DAERAH	3.778.211.000,-	3.711.458.831,-	66.752.169,-	98,23
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.137.943.000,-	2.079.086.682,-	58.856.318,-	97,25
1	Belanja Pegawai	2.137.943.000,-	2.079.086.682,-	5.885.318,-	97,25
II	BELANJA LANGSUNG	1.640.268.000,-	1.632.372.149,-	7.895.851,-	99,52
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	88.000.000,-	87.825.000,-	175.000,-	99,71
1	Penyusunan Profil Daerah (Pendataan Profil Desa/Kelurahan Dalam Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan)	60.000.000,-	59.825.000,-	175.000,-	99,71
2	Penyusunan Data Dasar Keluarga di Pedesaan/Kelurahan	28.000.000,-	28.000.000,-	-	100
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	55.000.000,-	55.000.000,-	-	100
3	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan	20.000.000,-	20.000.000,-	-	100
4	Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah (Pusat Pelayanan Terpadu (PPT))	25.000.000,-	25.000.000,-	-	100
5	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif (Pendamping Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL))	10.000.000,-	10.000.000,-	-	100
	SOSIAL	255.250.000,-	255.250.000,-	-	100
6	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan)	200.000.000,-	200.000.000,-	-	100
7	Program peningkatan keberdayaan masyarakat (PPKM)	40.250.000,-	40.250.000,-	-	100
8	Fasilitasi paska program peningkatan keberdayaan masyarakat (PPKM)	15.000.000,-	15.000.000,-	-	100

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.167.018.000,-			
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,-	2.000.000,-	-	100
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.918.000,-	11.713.524,-	4.204.476,-	73,59
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	5.900.000,-	5.900.000,-	399.500,-	91,85
13	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.200.000,-	19.200.000,-	-	100
14	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.000.000,-	41.000.000,-	-	100
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,-	45.000.000,-	-	100
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	16.500.000,-	16.500.000,-	-	100
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,-	30.000.000,-	-	100
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,-	3.000.000,-	-	100
19	Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000,-	39.980.000,-	20.000-	99,95
20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	25.000.000,-	25.000.000,-	-	100
21	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan, Tenaga Honoror / Kontrak	39.000.000,-	36.474.625,-	2.525.375,-	93,53
22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	30.000.000,-	30.000.000,-	-	100
23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	18.000.000,-	17.385.000,-	615.000-	96,58
24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	22.500.000,-	22.144.000,-	356.000-	98,42
25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,-	500.000,-	-	100
26	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100
27	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100
28	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000,-	5.000.000,-	-	100
29	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	40.000.000,-	40.000.000,-	-	100
30	Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	40.000.000,-	40.000.000,-	-	100
31	Pengembangan ekonomi kawasan dan pasar desa	75.000.000,-	75.000.000,-	-	100

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	32 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50.000.000,-	50.000.000,-	-	100
	33 Musyawarah pembangunan desa	185.000.000,-	185.000.000,-	-	100
	34 Pemberian Stimulan pembangunan Desa	200.000.000,-	200.000.000,-	-	100
	35 monitoring, evaluasi dan pelaporan	90.000.000,-	90.000.000,-	-	100
	36 fasilitasi ADD	90.000.000,-	90.000.000,-	-	100
	37 Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan	13.500.000,-	13.500.000,-	-	100
	38 fasilitasi program penguatan desa mandiri	10.000.000,-	10.000.000,-	-	100
	INDUSTRI	<u>25.000.000,-</u>	<u>25.000.000,-</u>	-	<u>100</u>
	39 Pengembangan sistem inovasi tehnologi industri	25.000.000,-	25.000.000,-	-	100

Tabel IV : Data Keuangan Sumber Dana dari APBD Tahun 2011.

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2011 adalah merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam LAKIP Tahun 2011 ini, masih terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Keberhasilan dan Kegagalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan media pertanggungjawaban Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan terhadap hasil penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat disimpulkan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan secara umum merupakan penjabaran RENSTRA TAHUN 2011-2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan dan Rencana Kegiatan Tahun 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan,

2. Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

- 1) Pemenuhan program dan kegiatan target kinerja RENSTRA 2011-2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan yang belum tercapai;
- 2) Peningkatan efektifitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Seringnya terjadi pergantian kader dan anggota pengurus kelembagaan / organisasi di tingkat desa;

- 4) Kurangnya bantuan untuk kegiatan penyerapan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG);
- 5) Keterbatasan pengetahuan masyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan kearah kemandirian;
- 6) Belum seluruhnya fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan kecamatan / pedesaan terbangun;

3. Strategi Pemecahan Masalah untuk tahun mendatang.

Berdasarkan kajian evaluasi kinerja LAKIP Tahun 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, agar di tahun mendatang peningkatan kinerja lebih meningkat lagi capaiannya guna lebih mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka terhadap program-program yang telah ditetapkan dan dianggarkan khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat (sebagaimana RPJMD 2011 – 2015), disarankan perencanaannya lebih dimantapkan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Lamongan, 2012

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. MS. HERUWIDI, MM
Pembina Tingkat
NIP. 19690219 198809 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Rencana Stratejik (RS)
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Penetapan Kinerja (PK)
- Pengukuran Kinerja

**RENCANA STRATEJIK
Tahun 2011**

INSTANSI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEDESAAN YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERETIKA DAN BERDAYA SAING DENGAN MENGEDEPANKAN PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMBANGUNAN

MISI 1 : MENGEMBANGKAN USAHA EKONOMI KERAKYATAN DI SEKTOR INFORMAL DENGAN MENDAYAGUNAKAN POTENSI EKONOMI

MISI 2 : MENGEMBANGKAN DAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DAN SUMBER DAYA DESA

MISI 3 : MELESTARIKAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT, KESWADAYAAN DAN KEGOTONG-ROYONGAN MASYARAKAT

MISI 4 : MENINGKATKAN PERAN SERTA KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN MASYARAKAT MELALUI MANAJEMEN PERENCANAAN PARTISIPATIF

MISI 5 : MENINGKATNYA INDUSTRI

Hal 1

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
1 Meningkatkan kemampuan ekonomi dan produktifitas dengan perencanaan yang akurat	1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan 1.2 Terselenggaranya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1.1.1 Tersedianya dokumen profil desa dan data dasar keluarga 1.2.1 Peningkatan SDM pelayanan dan pendamping PPT 1.2.2 Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan	Meningkatkan akurasi data tingkat perkembangan desa/kelurahan sebagai bahan acuan program pembangunan desa dan kelurahan	1 Pengembangan Data/Informasi 2 Penguatan Kelembagaan Pengarusulamaan Gender dan Anak 3 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	

<p>2 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang lenteram, tertib dan aman, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah</p>	<p>2.1 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial</p> <p>Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>Meningkatnya industri</p>	<p>2.1.1 Per urunan angka pengangguran</p> <p>2.1.2 Per urunan angka penduduk miskin</p> <p>2.1.3 Per ingkatan kir erja lembaga desa dan menantapkan kelembagaan desa</p> <p>2.1.4 Per ingkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</p> <p>2.1.5 Per ingkatan mutu produk</p>	<p>Meningkatkan Kualitas Hidup bagi FMKS dengan Feningkatan keberdayaan masyarakat dan pemberian stimulan pembangunan desa</p>	<p>4 Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>5 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</p> <p>6 Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</p> <p>7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</p> <p>8 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</p>	
--	---	---	--	--	--

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tahun 2011

INSTANSI :BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN

Hal 1

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	1.1 Tersedianya dokumen profil desa dan data dasar keluarga	100,00%	Pengembangan data/informasi	Penyusunan Profil Daerah (Pendataan Profil Desa/Kelurahan Dalam Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan)	Input	Rp	60.000.000	
					Output	desa	474	
					Input	Rp	28.000.000	
					Output	desa	14	
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.1 Peningkatan SDM pelayanan dan pendamping PPT	100%	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Input	Rp	20.000.000	
					Output	orang	50	
	2.2 Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	100%	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Input	Rp	25.000.000	
					Output	lembaga	1	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
3 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.	3.1 Penurunan angka pengangguran	8,56%	Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	Input	Rp	10.000.000		
					Output				
					Optimalisasi dan penatausahaan administrasi program P3EL	Kecamatan	1		
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (PNPM)	Input	Rp	200.000.000	
						Output			
						Menurunnya angka pengangguran di masyarakat	kecamatan	25	
					Program peningkatan keberdayaan masyarakat (PPKM)	Input	Rp	40.250.000	
				Output					
				Jumlah penduduk miskin kabupaten	desa	3			
	3.2 Penurunan angka penduduk miskin			Fasilitasi paska program peningkatan keberdayaan masyarakat (PPKM)	Input	Rp	15.000.000		
				Output					
				Jumlah masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan	desa	2			

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
4 Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.1 Peningkatan kinerja lembaga desa dan memantapkan kelembagaan desa	89,98%	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Input	Rp	40.000.000	
					Output			
					Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada LPM dan KPMJ	orang	160	
				pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	Input	Rp	40.000.000	
					Output			
					Pendidikan dan pelatihan teknis kepada masyarakat	orang	501	
	4.2 Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	100%	Pengembangan Lembaga ekonomi perdesaan	Pengembangan ekonomi kawasan dan pasar desa	Input	Rp	75.000.000	
					Output			
					Mengembangkan pasar desa	desa	2	
	4.3 Peningkatan Desa/Kelurahan yang memenuhi standar desa/kelurahan sehat		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Input	Rp	50000000	
				Output				
				Mengadakan kegiatan BBRM	Kegiatan	1		
			Musyawarah pembangunan desa	Input	Rp	185000000		
				Output				
				Melaksanakan musranbang desa	Desa	474		
				Pemberian Stimulan pembangunan Desa	Input	Rp	200000000	
					Output			
					Pelaksanaan penata usahaan pembangunan sarpas	Lokasi	213	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
5 Meningkatnya Industri	5.1 Peningkatan mutu produk	14%	Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input Output	Rp	90000000	
				fasilitasi ADD	Evaluasi pembangunan yang dilakukan	Kecamatan	27	
					Input Output	Rp	90000000	
					Optimalisasi penatausahaan administrasi ADD	Desa	462	
					Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan	Input Output	Rp	
Fasilitasi program penguatan desa mandiri	Terlaksananya pengembangan pembangunan potensi desa	Desa	27					
	Input Output	Rp	10000000					
Pembangunan sistem inovasi teknologi industri	Terwujudnya desa mandiri berbasis kawasan perdesaan	Desa	27					
				Input Output	Rp	25.000.000		
Tersosialisasinya teknologi tepat guna berstandar	Kegiatan	1						

**LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN**

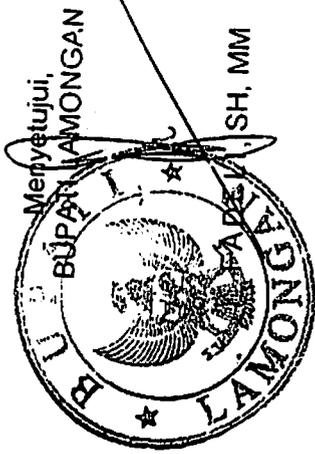
NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUT PUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET
1	Pengutan Kembangkan Gender dan Anak (Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kembangkan Pemberdayaan Anak (Pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT))	Meningkatkan Kapasitas dan Jaringan Kembangkan Pemberdayaan Anak (Pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT)	Pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT	50 orang	Meningkatnya SDM Pelayanan dan Pendamping PPT	20.000.000
2	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Tercapainya pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2)	1 Lembaga	Meningkatnya Perlindungan Perempuan di Daerah (PPT)	25.000.000
3	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Produktif (Pendampingan Ekonomi Produktif (Pendampingan Program Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)))	Meningkatkan Peran Perempuan di Pedesaan	Optimalisasi dan Peratusahaan Administrasi dan Program Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)	1 Kecamatan	Melancarkan Aktivitas Administrasi dan Realisasi Kegiatan sesuai dengan tahapan dan tepat waktu dalam pelaksanaannya	10.000.000
4	Pengembangan Data/informasi (Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan dalam Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Meningkatkan kualitas pendataan profil desa dan kelurahan	Melakukan pendataan dan penyusunan data profil desa dan kelurahan	1 Laporan	Meningkatnya kualitas data dan penyusunan data profil Desa / Kelurahan untuk diketahui tingkat perkembangan Desa / Kelurahan	50.000.000
5	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adai Tepencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Presana pendukung usaha bagi keluarga miskin (Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan)	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui program pengembangan program pengembangan	Memfasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan dan pelayanan proyek	25 Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa	200.000.000

ANGGARAN (Rp)

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)			3 Desa di 3 Kecamatan		8,56 %	40.250.000
7.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Penguatan SDM dan Kelengkapan Desa (LPM dan KPMD)))	Meningkatkan partisipasi dan peranan masyarakat di dalam pembangunan di desa	Melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi kepada anggota LPM dan KPMD	160 orang	Meningkatkan kinerja lembaga Desa dan Memantapkan Kelembagaan Desa (LPM, KPMD)	89,98 %	40.000.000
8.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Penyenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat (Sistem Informasi Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan))			501 orang		89,98 %	40.000.000
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat))	Meningkatkan partisipasinya dan peran masyarakat dalam pembangunan di desa	Mengadakan peringatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	1 Kegiatan	Meningkatnya partisipasinya dan peran masyarakat dalam pembangunan di desa dan lebih memasyarakatkan arti pentingnya lembaga kemasyarakatan	10,96 %	50.000.000
10.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa))	Meningkatkan kualitas kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan	Melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan di desa	474 Desa / Kelurahan	Meningkatkan Sistem Perencanaan Program dan Kegiatan di Desa/Kelurahan	10,96 %	185.000.000
11.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa (Pemberian Stimulan Desa (pendampingan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan))	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik melalui program pembangunan jembatan dan jalan poros desa	Tertaksananya Penatausahaan Pembangunan sarana dan prasarana Perdesaan	213 Lokasi	Melancarkan aktifitas administrasi dan Realisasi Kegiatan sesuai dengan tahapan dan tepat waktu dalam pelaksanaannya	100 %	80.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan))	Meningkatkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di desa melalui program pembangunan jalan poros desa	Mengadakan kegiatan monitoring, perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan jembatan dan jalan poros desa	27 Kecamatan	Tersedianya data untuk perencanaan dan pelaporan	10,96 %	60.000.000
13.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (Fasilitasi ADD (Pendamping Alokasi Dana Desa))	Mengadakan kegiatan monitoring, perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap program bantuan Alokasi Dana Desa	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi program bantuan Alokasi Dana Desa	462 Desa	Meningkatnya kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi proyek pembangunan Alokasi Dana Desa	10 %	90.000.000
14.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Dana Operasional Bantuan Keuangan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Produktif (BKIEP) Provinsi Jawa Timur	Mengadakan kegiatan monitoring, perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap program bantuan Keuangan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Produktif (Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi program bantuan Keuangan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Produktif	13 Lokasi	Meningkatnya kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi bantuan Keuangan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi Produktif	100 %	67.500.000
15.	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi (pengembangan sistim inovasi Teknologi industri (Gelar TTG Tingkat Nasional)	Meningkatkan pengembangan sistim, inovasi teknologi industri (Gelar TTG Tingkat Nasional)	Melaksanakan pelatihan kader TTG guna mengikuti gelar TTG tingkat nasional	1 Kegiatan	Memperkenalkan potensi dan hasil produksi unggulan Kabupaten Lamongan di daerah lain (peningkatan Mutu produk)	14 %	25.000.000
DANA PEMBANTUAN KABUPATEN							
16.	Pembangunan Jalan Poros Desa, Jembatan dan Plengsengan			213 Lokasi			11.000.000.000
17.	Penanganan Infrastruktur dan Pengembangan Sektor Ekonomi Produktif			13 Lokasi			7.770.000.000
18.	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan melalui program Bantuan Alokasi Dana Desa	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana melalui proyek Alokasi Dana Desa	Memfasilitasi proses penyaluran bantuan proyek Alokasi Dana Desa, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi/pengawasan	Bantuan Pembangunan Desa : - Ranking I = 5 Desa - Ranking II = 48 Desa - Ranking III = 409 Desa Bantuan Dusun : = 1430 Dusun	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik di lingkungan pedesaan dan meningkatnya sarana transportasi perekonomian pendidikan dan kesejahteraan masyarakat	27.328.000.000

2	3	4	5	6	7	8
Cost sharing PPKM Provinsi			3 Desa 3 Kecamatan			90.000.000
Cost Sharing Program Pengembangan Potensi Desa/ Kelurahan			1 Desa			25.000.000
Bantuan Keuangan dalam Program P3EL Bantuan Modal Kerja Kelompok Ekonomi Desa			1 Desa			20.000.000
22. Yayasan Kanker Indonesia (Peningkatan Kesadaran Pemahaman Ibu terhadap bahaya Penyakit Kanker)	Meningkatkan kesadaran ibu terhadap bahaya kanker	Pencegahan terjadinya kanker pada ibu	27 Kecamatan	Meningkatnya kesadaran pemahaman ibu terhadap bahaya penyakit kanker	100 %	50.100.000
23. Peningkatan peran serta PKK dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perempuan (Fasilitas: Tim Penggerak PKK)	Meningkatnya peranan F.KK dalam pemberdayaan keluarga	1 Tim Penggerak PKK Kab 27 Tim Penggerak PKK Kec 12 Tim Penggerak PKK Kel APE untuk TK dan PAUD PKK Kec (27 kec)	Terpunuhnya kegiatan PKK dalam berperannya TP-PKK Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan Tupoksinya		565.000.000
24. Cost sharing PNF-M Mandiri Perdesaan	Wilayah Kecamatan kategori miskin	Peningkatan dan pengentasan kemiskinan	25 Kecamatan	Meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan		7.200.000.000
25. Peningkatan Bantuan Kader Posyandu	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader posyandu	Melakukan pelatihan kader posyandu dan perwakilan kecamatan		Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan kader posyandu dalam melaksanakan kegiatan posyandu di desa		174.000.000



Menyetujui,
BUPATI LAMONGAN

SH, MM

Lamongan, 25 Januari 2011

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MS. HERUWIDI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690219 1988091 001

PENGUKURAN KINERJA
Tahun 2011

INSTANSI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STARATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	1.1 Tersedianya dokumen profil desa dan data dasar keluarga	100%		
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.1 Peningkatan SDM pelayanan dan pendamping PPT	100%		
	2.2 Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	100%		
3 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.	3.1 Penurunan angka pengangguran	8,56%		
	3.2 Penurunan angka penduduk miskin			
4 Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.1 Peningkatan kinerja lembaga desa dan memantapkan kelembagaan desa	89,98%		
	4.2 Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	100%		
	4.3 Peningkatan Desa/Kelurahan yang memenuhi standar desa/kelurahan sehat	10,96%		
5 Meningkatnya Industri	5.1 Peningkatan mutu produk	14%		

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp 1.640.268.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp 1.632.372.149